

**ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP RISK DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014)**

Hermas Aditya, Wahyu Meiranto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of board size, the proportion of independent board, managerial ownership, and institutional ownership. While risk disclosure as the dependent variable was measured using RDI (Risk Disclosure Index). There are 46 items on RDI. RDI incorporate components that are relevant to the banking companies, which came from Bank Indonesia Circular Letter in 2012. The elements contained in Circular Letter of Bank Indonesia has become material to obtain a list of disclosures of each company.

This study uses secondary data with entire population manufacture companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012 up to 2014. Sample contains from 28 companies. The method used to determine the sample using purposive sampling. The analytical method used is multiple regression as the analysis technique using by SPSS.

The results of hypothesis testing showed that board size and institutional ownership positively affects risk disclosure. While the proportion of independent board and managerial ownership did not significantly affect risk disclosure.

Keywords: board size, the proportion of independent board, managerial ownership, institutional ownership, risk disclosure, RDI

PENDAHULUAN

Dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pasti akan ditemui suatu hal yang disebut risiko. Termasuk juga dalam kegiatan bisnis, risiko akan ditemui dalam prosesnya untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Risiko muncul cenderung bersifat tidak pasti, namun ketidakpastian tersebut akan berdampak terhadap masa depan dalam proses pencapaian tujuan. Pada awalnya risiko dipandang negatif, sedangkan sekarang risiko dipandang baik secara positif maupun negatif dalam menanggapi sejumlah peristiwa (Linsey and Shirves, 2006). Karena terdapat berbagai persepsi mengenai risiko, maka pemegang saham suatu perusahaan memerlukan informasi lanjut mengenai *risk disclosure* atau pengungkapan risiko untuk membuat keputusan dalam melakukan kegiatan berbisnis serta berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hal tersebut dilakukan juga dalam rangka untuk menghindari risiko. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengelola risiko itu contohnya melalui manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990). Oleh karena itu perlu dilakukan pengungkapan risiko dalam mengelola risiko-risiko yang ada.

Pengungkapan risiko pada laporan keuangan dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan publik, komunikasi yang lebih baik tersebut diperlukan dan merupakan regulator yang mulai bereaksi (Probohudono *et al.*, 2013). Komunikasi ini dapat berupa pengungkapan risiko. Telah banyak peraturan mengenai pengungkapan, diantaranya adalah *International Accounting Standards Board* (IASB, 2008) di bawah

¹ Corresponding author

International Accounting Standard (IAS) No.1: Penyajian Laporan Keuangan dan IAS 32: Instrumen Keuangan: Penyajian [1] mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi tentang ketidakpastian utama yang dihadapi dan pengungkapan informasi untuk spesifik tertentu mengenai risiko. Selanjutnya, *Financial Accounting Standard Board* (FASB, 1998), di bawah SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No 133 menetapkan pengungkapan wajib risiko pasar yang timbul dari penggunaan aset keuangan.

Peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia diatur dalam BAPEPAM dan LK Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang: kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif.

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memiliki kandungan informasi berupa hal-hal yang wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan dengan tambahan informasi di dalamnya selain informasi yang wajib dicantumkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tahunan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan sukarela dapat mengubah harapan pemangku kepentingan tentang nilai perusahaan (Einhorn, 2007).

Dalam sekitar satu dekade terakhir mulai terjadi perubahan dalam bidang sosial politik dan ekonomi baik di Eropa maupun di Asia. Perubahan era globalisasi terhadap ekonomi global yang terjadi di berbagai negara berdampak juga pada Negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus lebih memahami visi, misi, dan tata kelola perusahaannya masing-masing baik pada perusahaan swasta maupun pemerintah demi keberlangsungan usaha. Dengan memahami visi, misi, dan tata kelola perusahaan maka akan dapat tercipta kegiatan perusahaan yang lebih terprogram. Kegiatan perusahaan yang terprogram dapat berjalan baik jika terdapat tata kelola perusahaan yang baik atau perusahaan tersebut menjalankan konsep dasar *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses manajerial perusahaan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan dasar dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Adapun prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* meliputi: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Sedangkan menurut (OECD), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dikelompokkan dalam lima hal yaitu: Perlindungan atas hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, peranan stakeholders dalam *Corporate Governance*, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas direksi dan komisaris.

Pengungkapan risiko secara sukarela berguna untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang di dalamnya meliputi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan juga struktur kepemilikan yang meliputi di antaranya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang berperan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, yang dapat mengontrol perusahaan sehingga dapat menurunkan konflik keagenan (*agency conflict*) antara pemilik dan manajer. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting karena dapat digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan kepada stakeholder atau pemegang saham (Healy dan Palepu, 2001).

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian yang berhubungan dengan *risk disclosure* maupun *Good Corporate Governance* dalam hal ini ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti terdapat perbedaan sampel, metode yang digunakan dalam pengukuran setiap variabel, latar tempat, waktu penelitian, maupun situasi atau kondisi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pengkajian ulang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *risk disclosure*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Risiko

Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian (Hartono, 1995). Dengan kata lain, risiko merupakan suatu hal yang cenderung bersifat tidak pasti namun dapat memengaruhi masa depan. Risiko dapat terjadi karena kurangnya bahkan tidak tersedianya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Ketidakterediaan informasi merupakan salah satu akibat dari timbulnya suatu masalah. Hal ini menyebabkan gangguan pada proses operasional suatu perusahaan. Bila gangguan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kerugian di masa yang akan datang. Kerugian ini dapat dikatakan sebagai risiko yang timbul di perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui secara mendetail tentang risiko-risiko yang dapat muncul agar mengurangi terjadinya kerugian.

Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko yang berpotensi muncul di masa depan, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko. Salah satu pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan perusahaan untuk mengelola risikonya atau menangkap kesempatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990).

Tindakan manajemen risiko diambil perusahaan untuk menghadapi bermacam-macam risiko. Dalam melakukan tindakan terhadap risiko, manajemen risiko berperan untuk merespon risiko dengan cara mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau melimpahkan risiko pada tahap awal proyek konstruksi.

Pengungkapan Risiko

Praktik pengungkapan risiko perusahaan merupakan bagian dari penerapan konsep pengungkapan (*disclosure*). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil suatu aktivitas suatu unit usaha. Dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang akan datang, prakiraan keuangan dan operasi, dan informasi lainnya (Nuswandari, 2009).

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memiliki kandungan informasi berupa hal-hal yang wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan dengan tambahan informasi di dalamnya selain informasi yang wajib dicantumkan sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan tahunan dalam mengambil keputusan. Pengungkapan sukarela dapat mengubah harapan pemangku kepentingan tentang nilai perusahaan (Einhorn, 2007).

Terdapat beberapa peraturan tentang pengungkapan telah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah ketentuan tentang pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko diatur dalam BAPEPAM dan LK Nomor:Kep-134/BL/2006 tentang : kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Sedangkan Ketentuan mengenai pengungkapan informasi diatur dalam PSAK No.60 (Revisi 2010) tentang Instrumen keuangan: Penyajian dan Pengungkapan. Standar ini menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) dapat diartikan sebagai hubungan antara *agent* atau manajemen suatu usaha dan *principal* atau pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut teori ini, baik pemegang saham maupun pihak manajemen lebih cenderung bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

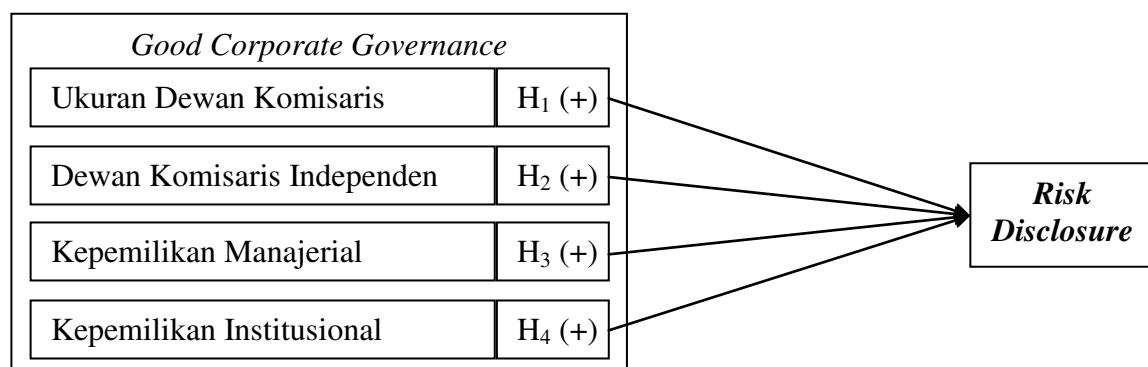
Hubungan antara pemegang saham dan pihak manajemen sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik yang biasa disebut dengan *agency conflict*. Teori agensi menyatakan bahwa antara pemegang saham dan pihak manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen adalah para pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya, sedangkan keputusan yang dibuat oleh para manajer agar dapat memaksimalkan kepuasannya sendiri ternyata tidak menyejahterakan pemegang saham, maka terjadi *agency conflict*.

Agency Conflict lainnya adalah manajemen terlalu banyak mengetahui informasi sebenarnya mengenai masalah yang ditimbulkan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham, sehingga menimbulkan asimetri informasi, di mana terjadi perbedaan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham sebagai pengguna informasi.

Kaitan teori ini dengan *risk disclosure* yaitu risiko berkaitan dengan ketidakpastian. Sedangkan pemegang saham juga cenderung ingin sesuatu yang pasti dari pihak manajemen, dan tidak ada keterbatasan maupun asimetri informasi yang diberikan. Sehingga pengungkapan risiko akan menjembatani hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Sedangkan *Good Corporate Governance* berperan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen yang mungkin merugikan pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip-prinsip pokok GCG yang perlu diperhatikan agar praktik penyelenggaraannya berjalan lancar seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. Prinsip-prinsip tersebut sudah cukup menggambarkan hubungan yang seharusnya terjadi antara manajemen dan pemegang saham. *Good Corporate Governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Sehingga inti dari kaitan teori agensi dengan variabel penelitian adalah menjembatani hubungan antara manajemen dan pemegang saham secara baik.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harus adanya pengawasan agar manajemen dapat terkendali dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat mengurangi biaya yang timbul. Komisaris Independen dan Struktur kepemilikan seperti kepemilikan manajerial dan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham, seperti yang dilakukan oleh komisaris independen. Sedangkan ukuran Dewan Komisaris atau *Board Size* mengindikasikan akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika ukurannya lebih besar. Menurut Dalton *et al.*, (1999) board size dengan ukuran yang optimum lebih efektif daripada *board size* dengan ukuran kecil.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Risk Disclosure*

Ukuran Dewan Komisaris atau *Board Size* mengindikasikan akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika ukurannya lebih besar. Sehingga manajemen dan pemegang saham dapat saling mengawasi dan terhindar munculnya asimetri informasi. Pada beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang signifikan dari ukuran dewan komisaris pada pengungkapan risiko. Menurut Dalton *et al.*, (1999) dewan komisaris dengan ukuran yang optimum lebih semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen daripada dewan komisaris dengan ukuran kecil. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006). Pada penelitian sebelumnya terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Risk Disclosure*

Komisaris Independen merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan atau *agency cost*. Komisaris independen membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham. Pemegang saham cenderung menuntut kepada komisaris independen untuk melakukan pengungkapan yang dilakukan secara luas.

Hasil dari kebanyakan penelitian terdahulu juga mencatat hubungan positif antara komisaris independen dan tingkat pengungkapan (Baek *et al.*, 2009; Chen dan Jaggi, 2000; Cheng dan Courtenay, 2006; Beretta dan Bozzoland, 2004; Garcia-Meca dan Sanches-Ballesta, 2010 dalam Prubohudono *et al.*, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Risk Disclosure*

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham. Penelitian sebelumnya menghasilkan hasil pengaruh yang signifikan dari kepemilikan manajerial pada pengungkapan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Gerb (2000) dalam Prubohudono *et al.*, (2013) menguji pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan risiko sebuah perusahaan dan menemukan perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih rendah memungkinkan pengungkapan risiko yang lebih informatif daripada perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Prubohudono *et al.*, (2013) meneliti bahwa adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan peningkatan pengungkapan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Risk Disclosure*

Sama seperti kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Dikarenakan struktur kepemilikan bertindak sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik domestik maupun

asing (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi lainnya, warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia). Kepemilikan institusional di sini bertindak sebagai pihak investor baik domestik maupun asing yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor non manajerial dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornet *et al.*, 2006). Perusahaan akan berjalan dengan baik karena kepemilikan institusional akan selalu memonitoring segala aktivitas perusahaan, sehingga manajemen akan memaksimalkan kinerjanya, hal ini juga dapat mengurangi biaya agensi. Sedangkan untuk kepemilikan institusional asing juga dapat mendatangkan manfaat pada perusahaan. Seperti contohnya semakin banyak pihak asing yang memiliki saham di perusahaan domestik maka perusahaan mungkin dapat berkembang menjadi perusahaan multinasional. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko (*risk disclosure*). Pengungkapan risiko merupakan pemberian informasi kepada pihak yang memerlukan mengenai potensi kesempatan atau hambatan maupun eksposur pada strategi, tindakan dan kinerja perusahaan yang telah atau akan berpengaruh pada perusahaan (Linsley dan Shrivess, 2006). Laporan mengenai pengungkapan risiko biasanya disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris merupakan bagian dari *corporate governance*. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Ukuran dewan komisaris dihitung dengan cara mencari jumlah komisaris keseluruhan dalam suatu perusahaan. Proporsi jumlah komisaris independen dapat menggambarkan tingkat independensi dan objektivitas dewan dalam pengambilan keputusan (Spira dan Bender, 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan cara membandingkan jumlah komisaris independen dengan ukuran dewan komisaris. Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dalam satu perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013), variabel kepemilikan manajemen ini menggunakan persentase kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik domestik maupun asing (pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi lainnya, warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013), variabel kepemilikan institusional ini menggunakan persentase kepemilikan manajerial.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang pada tahun 2011 s.d. 2013 terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 s.d. 2014 yang juga memenuhi kriteria penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan agar informasi yang diperoleh dengan menggunakan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dapat diolah secara tepat sasaran. Kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 s.d. 2014.
2. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2012 s.d. 2014 secara lengkap.
3. Sampel yang dipilih adalah perusahaan perbankan yang memiliki data-data terkait dengan variabel penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis *multivariate* dengan menggunakan regresi berganda untuk pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$RDI = \alpha + \beta_1 BOARDSIZE + \beta_2 BOARDINDEP + \beta_3 INSTOWN + \beta_4 MGROWN + e$$

Keterangan :

RDI : Risk Disclosure Index

α : Konstanta

$\beta, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

BOARDSIZE : Ukuran Dewan Komisaris

BOARDINDEP : Proporsi Komisaris Independen

MGROWN : Kepemilikan Manajerial

INSTOWN : Kepemilikan Institusional

e : Variabel Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan yaitu pada perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan melaporkan laporan keuangan berupa *annual report* yang memiliki pengungkapan risiko selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan sampel yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 1
Sampel Perusahaan

Kriteria	Jumlah
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014	33
Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan annual report	(4)
Perusahaan yang tidak memiliki data-data lengkap mengenai variabel penelitian	(1)
Jumlah perusahaan yang diteliti	28
Total Sampel = 28 x 3	84

Sumber: Data Sekunder

Dari tabel di atas, maka dapat terlihat diperoleh sebanyak 84 perusahaan dengan syarat yang lengkap. Selanjutnya sejumlah data tersebut digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

Analisis Data

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi dari data masing-masing variabel dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari data penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil statistik deskriptif setiap variabel ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARDSIZE	84	2.0000	9.0000	5.2381	1.8473
BOARDINDEP	84	0.3333	0.8000	0.5577	0.0920
INSTOWN	84	9.9000	99.9900	70.0062	23.2339
MGROWN	84	0.0000	28.2300	1.5735	5.3493
RDI	84	0.2826	0.8261	0.5562	0.1370
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Sekunder

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi dari model penelitian. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *risk disclosure*. Variabel proporsi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan *risk disclosure*. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan *risk disclosure*. Variabel kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan *risk disclosure*.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.539	.013
BOARDSIZE	4.449	.000
BOARDINDEP	.092	.927
INSTOWN	2.384	.020
MGROWN	.659	.511

Sumber: Data sekunder

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko

Pengujian pengaruh variabel ukuran dewan komisaris manajerial terhadap pengungkapan risiko memiliki nilai t hitung sebesar 4,449 dengan nilai sig 0,000. Nilai sig sebesar $0,036 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Dengan demikian **H₁ diterima**.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Risiko

Pengujian pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan risiko memiliki nilai t hitung sebesar 0,092 dengan nilai sig 0,927. Nilai sig sebesar $0,927 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Dengan demikian **H₂ ditolak**.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Risiko

Pengujian pengaruh variabel Kepemilikan institusi terhadap pengungkapan risiko memiliki nilai t hitung sebesar 2,384 dengan nilai sig 0,020. Nilai sig sebesar $0,020 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko. Dengan demikian **H₃ diterima**.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Risiko

Pengujian pengaruh variabel Kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan risiko memiliki nilai t hitung sebesar 0,659 dengan nilai sig 0,511. Nilai sig sebesar $0,511 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko. Dengan demikian **H₄ ditolak**.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Bank dengan jumlah komisaris yang banyak akan mengungkapkan pengungkapan risiko yang lebih luas. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Kepemilikan saham institusi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Bank dengan kepemilikan saham institusi yang lebih banyak mengungkapkan pengungkapan risiko yang lebih luas. Kepemilikan saham manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu pelaksanaan *content analysis*, yang seharusnya dilakukan oleh 2 orang, hanya dilakukan oleh 1 orang, menyebabkan adanya tingkat subyektivitas yang cukup tinggi pada hasil analisis pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan. Pelaksanaan *content analysis* pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan oleh 2 orang, untuk mengurangi adanya subyektivitas dalam pengukuran variabel kalimat pengungkapan risiko.

Dengan hasil yang diperoleh tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah hendaknya para investor dapat mencari informasi tentang kondisi perusahaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Bagi perusahaan dapat mengungkapkan laporan tahunan secara lengkap untuk memudahkan penelitian. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga didapatkan hasil penelitian yang dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat.

REFERENSI

- Amran, A., A.M.R. Bin, dan B.C.H.M. Hassan. 2009. *An exploratory study on risk disclosure in Malaysian annual reports*. Managerial Auditing Journal 24(1): 39-57.
- Baek, H.Y., Johnson, D.R. and Kim, J.W. 2009. *Managerial Ownership, Corporate Governance, and Voluntary Disclosure*. Journal of Business and Economic Studies, Vol. 15 No. 2, pp. 44-61.
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. Available at : <http://papers.ssrn.com/>
- Dalton D., Daily C., Johnson J. & Ellstrad, A. 199. *Number of Director and Financial Performance: Meta Analysis*. Academy of Management Journal, 42 (6): 674-686
- Einhorn, E. 2007. *Voluntary Disclosure under Uncertainty about The Reporting Objective*. Journal of Accounting and Economics. Vol.43 No.2-3, pp.245-74

- FASB (1998). *Summary of Statement No. 133. Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities (Issued 6/98)*. available at: <http://www.fasb.org/summary/>
- Hartono, Sri Redjeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 62
- IASB (2008). *Presentation of financial statement*. available at: <http://www.iasb.org/>
- Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976. *Theory Of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Vol 3 October. Pp 305-360.
- Linsley, P.M. and Shrives, P.J. 2006. *Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in The Annual Reports of UK Companies*. The British Accounting Reviews. Vol. 38 No. 4. pp. 387-404.
- Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan. <http://iaiglobal.org>
- Probohudono, A. N., G. Tower and Rusmin R. 2013. *Risk Disclosure During The Global Financial Crisis*. Social Responsibility Journal. Vol 09. No 1. page 124-136
- Smith, C.W., Jr. 1990. *Corporate Risk Management : Theory and Practice*. Journal De-rivativees, Vol. 2, No. 4, Page 21-30
- Spira, L. F. and Bender, R. 2004. *Compare and Contrast: Perspectives on Board Committees*. Corporate Governance. 12, 489-499